

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED**

Polbangtan Yogyakarta
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Polbangtan Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Polbangtan Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Polbangtan Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Bambang Sudarmanto, SPt., MP
NIP. 196705091996031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Polbangtan Yogyakarta yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Bambang Sudarmanto, SPt., MP
NIP. 196705091996031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Polbangtan Yogyakarta Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp186.033.250,00 atau mencapai 270% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp69.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp.689.427.593,00 atau mencapai 125% dari alokasi anggaran sebesar Rp.553.268.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.381.724.386.516,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.610.500,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.381.655.306,016,00 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.1.381.724.386.516,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.95.043.007,00 dan Rp1.381.724.386.516,00

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp632.138.211,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp-31.982.973.415,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp31.350.835.204,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp57.289.382,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.31.293.545.822,00

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.381.922.971.544,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-31.293.545.822,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp30.999.917.787,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.381.629.343.509,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**POLBANGTAN YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	553.268.000,00	689.427.593,00	125	186.033.250,00
Jumlah Pendapatan		553.268.000,00	689.427.593,00	125	186.033.250,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	7.352.722.000,00	7.209.571.810,00	98	6.187.354.484,00
Belanja Barang	B.4.	24.274.134.000,00	24.117.440.970,00	99	21.170.403.590,00
Belanja Modal	B.5.	365.004.000,00	362.332.600,00	99	00
Jumlah Belanja		31.991.860.000,00	31.689.345.380,00	99	27.357.758.074,00

II. NERACA

**POLBANGTAN YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0,00	0,00
Persediaan	C.1.3.	1.610.500,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.4.	0,00	0,00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		1.610.500,00	0,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	1.365.303.295.998,00	1.365.303.295.998,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	19.449.665.767,00	19.102.318.167,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	37.905.819.266,00	37.905.819.266,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.562.886.080,00	1.547.901.080,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	1.175.522.860,00	1.175.522.860,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-44.403.575.765,00	-43.085.787.007,00
Jumlah Aset Tetap		1.380.993.614.206,00	1.381.949.070.364,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	0,00	0,00
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2.	67.470.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Aset		1.381.062.694.706,00	1.381.949.070.364,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	95.043.007,00	26.098.820,00
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.2.	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.3.	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		95.043.007,00	26.098.820,00
Jumlah Kewajiban		95.043.007,00	26.098.820,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	1.380.967.651.699,00	1.381.922.971.544,00
Jumlah Ekuitas		1.380.967.651.699,00	1.381.922.971.544,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		1.381.062.694.706,00	1.381.949.070.364,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**POLBANGTAN YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	632.138.211,00	98.263.824,00
JUMLAH PENDAPATAN		632.138.211,00	98.263.824,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	7.208.538.010,00	6.188.388.284,00
Beban Persediaan	D.3.	18.375.400,00	10.000.000,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	18.139.057.235,00	13.516.699.872,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.319.588.837,00	1.318.136.383,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	3.966.316.985,00	5.577.859.804,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	675.000.000,00	750.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.317.788.758,00	1.435.821.281,00
JUMLAH BEBAN		32.644.665.225,00	-28.796.905.624,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-32.012.527.014,00	-28.698.641.800,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	3.909.090,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	57.289.382,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		57.289.382,00	83.860.336,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-31.955.237.632,00	-28.610.872.374,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**POLBANGTAN YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	1.381.922.971.544,00	1.383.362.119.094,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-31.955.237.632,00	-28.610.872.374,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	30.999.917.787,00	27.171.724.824,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-955.319.845,00	-1.439.147.550,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	1.380.967.651.699,00	1.381.992.971.544,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Polbangtan Yogyakarta

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang Kampus Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, Program, Anggaran dan kerjasama pendidikan
2. Pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi pertanian
3. Pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni
6. Pengelolaan administrasi umum
7. Pengelolaan teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan komunikasi, perustakaan dan asrama
8. Pembinaan Civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan
9. Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
10. Pelaksanaan sistem pengawasan internal
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani “.

MISI :

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan Sektor Pertanian;
3. Menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
4. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
5. Menjalin kemitraan dan jejaring kerja sama pendidikan; dan
6. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan

TUJUAN :

Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan serta berjiwa pengabdian kepada bangsa dan negara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Polbangtan Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Polbangtan Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Polbangtan Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Polbangtan Yogyakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Polbangtan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Polbangtan Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	53.835.000,00	553.268.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	53.835.000,00	553.268.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.459.869.000,00	7.177.777.000,00
Belanja Lembur	208.291.000,00	174.945.000,00
Belanja Barang Operasional	1.698.854.000,00	1.636.613,00
Belanja Barang Non Operasional	12.762.155.000,00	14.914.271.000,00
Belanja Barang Persediaan	17.000.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa	1.555.820.000,00	1.215.315.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.263.370.000,00	1.319.664.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.342.770.000,00	4.063.985.000,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	675.000.000,00	675.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	350.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	15.000.000,00
Jumlah Belanja	29.983.129.000,00	31.991.860.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp689.427.593,00 atau mencapai 125% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp553.268.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan/ Penerimaan Negara Bukan Pajak	553.268.000,00		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan		490.153.800,00	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		30.931.011,00	
	553.268.000,00	521.084.811,00	94.18
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		110.400.000,00	
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan			
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		653.400,00	
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		3,228.284	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang LAlu		54.061.098	
Jumlah	553.268.000,00	689.427.593,00	125

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami Kenaikan sebesar 271% dibandingkan TA 2023. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Polbangtan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian : untuk kebun Celeban komoditas Oyong/ Gambas, Cabai Rawit, Cabai Keriting, Sukun, Melon ; kebun Morangan ; Gabah Kering Panen ; kebun Banyak ; Gabah Kering Panen, Tomat dan Cabai Rawit ; Karang Sari : Cabai Rawit, Cabang Keriting, Sukun, Serai Dapur. dan pendapatan penjualan hasil pertanian berupa kayu berdasarkan Berita Acara Nomor : 2257/KU.030/I.8.1/3/2024 tanggal 20 Maret 2024.
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas dari bulan Januari sd September tahun 2024.

3. Pendapatan Denda keterlambatan Pembelian Belanja Peralatan dan Mesin berupa laptop
4. Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan berupa biaya pendataran PMB
5. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu : pengembalian belanja pegawai berupa uang makan ASN bulan Desember 2024, kekurangan gaji bulan oktober 2024 sd januari 2024 dan kekurangan gaji tunjangan fungsional bulan November 2021 an. Dr. Epsi Euriga dan kekurangan gaji bulan April 2024 sd desember 2024 an. Sumarna, SST
6. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu : pengembalian perjalanan Monev PLK dan Kegiatan Evaluasi dan Laporan kegiatan di TA 2024 dan Pengembalian tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Perbandingan Realisasi		
Akun Pendapatan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	.%
Pendapatan/ Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	490.153.800,00	69.487.600,00	605
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	30.931.011,00	27.776.224,00	11
	521.084.811,00	97.263.824,00	436
Pendapatan Denda			
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	653.400,00	0,00	100
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi			
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	110.400.000,00	0,00	100
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.228.284,00	4.500.000,00	-28
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lain	54.061.098,00	79.360.336,00	-32
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	1.000.000,00	-100
Jumlah	689.427.593,00	186.033.250,00	271

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp31.689.345.380,00 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp31.991.860.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	7.352.722.000,00	7.213.079.618,00	2
Belanja Barang	24.274.134.000,00	24.242.397.164,00	0
Belanja Modal	365.004.000,00	347.347.600,00	5
Total Belanja Kotor	31.991.860.000,00	31.817.809.382,00	1
Pengembalian Belanja		-128.464.002,00	-100
Total Belanja	31.991.860.000,00	31.689.345.380,00	1

Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 16% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp.3.507.750,00 berupa Pembulatan Gaji PNS, tunjangan PPh PNS, tunjangan umum PNS.
2. Pengembalian belanja barang sebesar Rp.124.956.194,00,- yaitu honor operasional satuan kerja berupa honor narasumber, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh di stadion sultan agung kab.bantul tgl 24 januari 2024/kunker, persiapan pembelajaran semester genap, perjalanan dinas monev dan penarikan mahasiswa MBKM semester ganjil prodi PBB dan perjalanan dinas paket meeting laur kota berupa uang saku peserta workshop penyusunan manajemen resiko indeks (MRI) dalam rangka SPI, pengembalian peningkatan kopentensi mahasiswa melalui sertifikasi 3 Prodi

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Belanja Pegawai	7.213.079.618,00	6.189.789.914,00	17
Belanja Barang	24.242.397.164,00	21.303.094.242,00	14
Belanja Modal	347.347.600,00	0,00	100
Total Belanja Kotor	31.817.809.382,00	27.492.884.156,00	16
Pengembalian Belanja	-128.464.002,00	-135.126.082,00	-5

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Total Belanja	31.689.345.380,00	27.357.756.074,00	16

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.209.571.810,00 dan Rp. 6.187.354.484,00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negar, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 17% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya 2 pegawai pensiun an. Gunawan Yulianto dan Endra Prasetyanta

Data Kepegawaian Polbangtan Yogyakarta – Magelang Kampus Yogyakarta

KODE ESELON I	NAMA SATKER	UPT				JUMLAH
		FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM	PPPK	CPNS	
018	Polbangtan Yogyakarta	45	44	3	0	92
	JUMLAH	45	44	3	0	92

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.875.594.358,00	6.107.786.598,00	13
Belanja Gaji dan Tunjanagna PPPK	183.082.260,00	52.963.316,00	246
Belanja Lembur	154.403.000,00	29.040.000,00	432
Jumlah Kotor	7.213.079.618,00	6.189.769.914,00	17
Pengembalian Belanja Pegawai	3.507.808,00	2.435.430,00	44
Jumlah Belanja	7.209.571.810,00	6.187.354.484,00	17

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.24.117.440.970,00 dan Rp.21.170.403.590,00 Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 6% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya kegiatan yang sudah terlaksana karena masih menyelesaikan kegiatan internal yang sudah terjadwal

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.035.681.447,00	1.618.431.787,00	26
Belanja Barang Non Operasional	14.910.847.800,00	10.528.490.144,00	42
Belanja Barang Persediaan	19.985.900,00	10.000.000,00	100
Belanja Jasa	1.279.976.561,00	1.366.629.222,00	-16
Belanja Pemeliharaan	1.319.588.837,00	1.321.140.849,00	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.001.316.619,00	4.427.324.000,00	-10
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	675.000.000,00	750.000.000,00	-10
Jumlah Belanja Kotor	24.242.397.164,00	21.303.094.242,00	14
Pengembalian Belanja Barang	124.956.194,00	132.690.652,00	-6
Jumlah Belanja	24.117.440.970,00	21.170.403.590,00	6

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp362.332.600,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	347.347.600,00	0,00	100
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	14.985.000,00	0,00	100
Jumlah Belanja Kotor	362.332.600,00	0,00	100
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	100
Jumlah Belanja	362.332.600,00	0,00	100

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024
Uang Tunai di Brankas	0,00
Saldo di Bank	0,00
Kwitansi UP	0,00
Uang Muka	0,00
Jumlah	0,00

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.610.500,00 dan Rp0,00. Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Persediaan Konsumsi	1.610.500,00	0,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	0,00	0,00
Jumlah	1.610.500,00	0,00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Terdapat Piutang Bukan Pajak senilai Rp0,00 yang merupakan potongan sewa rumah dinas melalui potongan SPM

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.365.303.295.998,00 dan Rp1.365.303.295.998,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.449.665.767,00 dan Rp19.102.318.167,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp37.905.819.266,00 dan Rp37.905.819.266,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.562.886.080,00 dan Rp1.547.901.080,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.175.522.860,00 dan Rp1.175.522.860,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-43.741.883.955,00 dan Rp-43.085.787.007,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	19.449.665.767,00	-18.287.936.750,00	1.161.729.017,00
2.	Gedung dan Bangunan	37.905.819.266,00	-25.100.931.210,00	12.804.880.056,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.562.886.080,00	-994.632.805,00	568.253.275,00
4.	Aset Tetap Lainnya	1.175.522.860,00	-20.075.000,00	1.155.447.860,00
Akumulasi Penyusutan		60.093.893.973,00	-44.403.575.765,00	15.690.318.208,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.00,- dan Rp.00,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Polbangtan Yogyakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00	0,00

C.3.3 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.95.043.007,00 dan Rp.0,00

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	95.043.007,00	0,00
Utang yang belum ditagihkan	0,00	0,00
Jumlah	95.043.007,00	0,00

Berdasarkan table diatas pada periode laporan per 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut : Merupakan termasuk kriteria RPATA dengan SP2D yang keluar di januari 2025

1. Pembayaran Pengadaan Jasa Internet sebanyak 1 paket untuk bulan Desember 2024 sebesar Rp.15.000.000,-
2. Pembayaran Pengadaan Konsumsi mahasiswa 1 paket bulan Desember sebesar Rp. 52.470.000
3. AkruaI Belanja Langganan Listrik Rp.27.291.293,-
4. AkruaI Belanja Langganan Telepon Rp.172.714,-
5. AkruaI Belanja Langganan Air Rp.109.000,-

C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00.

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Polbangtan Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Utang yang belum ditagihkan	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.380.967.651.699,00 dan Rp1.381.922.971.544.00 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp632.138.211,00.- dan Rp98.263.824,00.- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Ujian/ Seleksi masuk Pendidikan	110.400.000,00	0,00	100
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	490.153.800,00	69.487.600,00	605
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	653,400,00	0,00	100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30.931.011,00	27.776.244,00	11
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	1.000.000,00	-100
Jumlah	632.138.211,00	98.263.824,00	543

Realisasi PNBP berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp.689.427.593,00 sedangkan realisasi berdasarkan LO sebesar Rp.632.138.211. Atas realisasi tersebut terdapat selisih realisasi antara laporan sebesar Rp57.289.382,00. (Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya) Penjelasan atas selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan yang diakibatkan adanya perbedaan periode pengakuan pendapatan kas dan Akrual. Pendapatan Kas (LRA) diakui pada saat kas diterima, sedangkan pendapatan akrual (LO) diakui pada saat satker memiliki hak atas pendapatan tersebut.

Perbedaan yang diakibatkan cara penyajian saldo di masing-masing laporan, pada LRA disajikan untuk dua digit akun pendapatan yaitu PNBP sedangkan pada LO disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi (4 digit).

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Laporan Operasional, realisasi PNBP dirinci sebagai berikut:

I. Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional adalah Pendapatan Operasional dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dengan rincian akun 6 digit sebagai berikut:

Akun	Uraian	Nilai
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	490.153.800
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30.931.011
425411	Pendapatan Ujian/ Seleksi Masuk Pendidikan	110.400.000
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	653.400
Jumlah		632.138.211

II. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional berasal dari :

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Tidak Ada

2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Akun	Uraian	Nilai
425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.228.284
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	54.061.098
Jumlah		57.289.382

Selisih antara LO dengan LRA

Akun	Uraian	LO	LRA	Selisih
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	490.153.800	490.153.800	-
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	110.400.000	110.400.000	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30.931.011	30.931.011	-
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	653.400	653.400	-

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.208.538.010,00. Dan Rp.6.188.388.284,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat asset, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.947.091.600,00	4.378.067.940,00	13
Beban Pembulatan Gaji PNS	69.701,00	63.671,00	9
Beban Tunj. Anak PNS	121.909.364,00	101.532.000,00	20
Beban Tunj. Beras PNS	271.140.480,00	257.960.040,00	5
Beban Tunj. Fungsional PNS	385.139.800,00	359.542.200,00	7
Beban Tunj. PPh PNS	55.779.163,00	18.305.761,00	205
Beban Tunj. Struktural PNS	0,00	0,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	396.836.450,00	353.725.180,00	12
Beban Tunjangan Umum PNS	119.655.000,00	114.560.000,00	4
Beban Uang Lembur	154.403.000,00	29.040.000,00	432
Beban Uang Makan PNS	576.939.000,00	525.063.000,00	10
Beban Gaji Pokok PPPK	138.345.200,00	36.601.200,00	278
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.800,00	636,00	183
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	4.674.740,00	1.236.760,00	278
Beban Tunj. Fungsional PPPK	18.060.000,00	5.160.000,00	250
Beban Tunj. Beras PPPK	4.055.520,00	1.158.720,00	250
Beban Uang Makan PPPK	17.945.000,00	8.806.000,00	104
Jumlah	7.208.538.010,00	6.188.388.284,00	16

Rincian Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai

Kode	Uraian	Total
51	Belanja Pegawai	7.213.079.618,00
1211	Beban Pegawai	7.208.538.010,00
Perbedaan		4.541.608,00

Selisih Belanja Pegawai dan Beban Pegawai sebesar Rp. 1.033.800,00,- dikarenakan adanya:

- Akrua! Kekurangan Gaji Pegawai bulan Oktober dan Tunjangan Fungsional Rp.1.033.800,-
- Pengembalian Belanja Tahun Berjalan Rp.3.507.808,-

Akun	Uraian	LRA	LO	Perbedaan
511111	Belanja Pegawai	7.213.079.618	7.208.538.010	4.541.608

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.990.000,00,- dan Rp000,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	18.375.400,00	10.000.000,00	
Jumlah	18.375.400,00	10.000.000,00	

Rincian Beban Persediaan dan Belanja Persediaan

Akun	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
593111	Beban Persediaan	18.375.400	19.985.900	1.610.500

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.139.057.235,00 dan

Rp13.516.699.872,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1.577.849.460,00	2.214.671.966,00	-29
Beban Barang Non Operasional Lainnya	6.840.103.340,00	7.460.028.178,00	-8
Beban Barang Operasional Lainnya	496.473.307,00	56.650.000,00	776
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	113.178.000,00	217.032.000,00	-48
Beban Honor Output Kegiatan	6.463.050.000,00	653.790.000,00	889
Beban Jasa Lainnya	242.071.050,00	234.164.975,00	3
Beban Jasa Profesi	328.900.000,00	291.390.000,00	13
Beban Keperluan Perkantoran	1.425.404.640,00	1.344.364.487,00	6
Beban Langganan Air	1.358.000,00	1.332.000,00	2
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	228.000.000,00	228.000.000,00	0
Beban Langganan Listrik	327.599.106,00	305.630.945,00	7
Beban Langganan Telepon	1.656.392,00	1.677.152,00	-1
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	625.500,00	184.500,00	239
Beban Sewa	152.900.000,00	328.926.626,00	-54
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	29.840.000,00	0,00	100
Jumlah	18.139.057.235,00	15.587.084.555,00	16

Untuk kegiatan masih banyak yang belum terlaksana di karenakan masih mengerjakan pekerjaan rutin mahasiswa,.

Rincian Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa

Kode	Uraian	Total
52	Belanja Barang dan Jasa	18.136.549.248,00
1211	Beban Barang dan Jasa	18.139.075.235,00
	Perbedaan	-2.507.987,00

Selisih disebabkan adanya :

Perbandingan Beban Barang dan Jasa

Akun	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.425.404.640	1.425.404.640	-
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	625.500	625.500	-
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	113.178.000	113.178.000	-
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(27.000)	(27.000)	-
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	496.473.307	496.473.307	-
521211	Beban Bahan	1.577.849.460	1.577.849.460	-
521211	Pengembalian Beban Bahan	(700.000)	(700.000)	-
521213	Beban Honor Output Kegiatan	6.463.050.000	6.463.050.000	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	6.840.108.340	6.840.108.340	-
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(17.879.560)	(17.879.560)	-
521219	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	29.840.000	29.840.000	-
522111	Beban Langganan Listrik	327.599.106	325.127.340	2.471.766
522112	Beban Langganan Telepon	1.656.392	1.621.171	35.221
522113	Beban Langganan Air	1.358.000	1.357.000	1.000
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	228.000.000	228.000.000	-
522141	Beban Sewa	152.900.000	152.900.000	-
522151	Beban Jasa Profesi	328.900.000	328.900.000	-
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	(71.350.000)	(71.350.000)	-
522191	Beban Jasa Lainnya	242.071.050	242.071.050	-
	Total	18.139.057.235	18.136.549.248	2.507.987

1. Beban Listrik Desember 2023 yang di bayarkan di Januari 2024 sebesar Rp.24.819.527,- dan Beban listrik Desember 2024 yg masih harus dibayar di Januari 2025 sebesar Rp.27.291.293,-terdapat selisih Rp.2.471.766,-
2. Beban Telepon Desember 2023 yang di bayarkan di Januari 2024 sebesar Rp.137.493,- dan Beban Telepon Desember 2024 yg masih harus dibayar di Januari 2025 sebesar Rp.172.714,-terdapat selisih Rp.35.221,-
3. Beban Air Desember 2023 yang di bayarkan di Januari 2024 sebesar Rp.108.000,- dan Beban Air Desember 2024 yg masih harus dibayar di Januari 2025 sebesar Rp.109.000,-terdapat selisih Rp.1.000,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.319.588.837,00,- dan Rp.1.318.136.383,00,-Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	731.303.831,00	701.596.112,00	4
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	588.285.006,00	616.540.271,00	-5
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan suku cadang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.319.588.837,00	1.318.136.383,00	0,00

- Untuk Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Beban Persediaan Suku Cadang untuk tahun ini tidak ada.

BEBAN PEMELIHARAAN

Akun	Uraian	LRA	LO	Selisih
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	731.303.831,00	731.303.831,00	-
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	588.285.006,00	588.285.006,00	-
	Total	1.319.588.837,00	1.319.588.837,00	-

Rincian Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan

Kode	Uraian	Total
52	Belanja Pemeliharaan	1.319.588.837,00
1211	Beban Pemeliharaan	1.319.588.837,00
Perbedaan		0,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.966.316.985,00 dan Rp5.577.859.804,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.542.320.732,00	3.117.440.301,00	-18
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	212.550.000,00	114.680.500,00	85
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.211.446.253,00	2.345.739.003,00	-48
Jumlah	3.966.316.985,00	5.577.859.804,00	-29

Penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas adalah bahwa untuk tahun 2024 beban perjalanan dinas menurun jika dibandingkan tahun 2023.

- Adanya refocusing anggaran.
- Pengembalian Belanja Tahun Berjalan

Rincian Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas

Akun	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
524111	Beban Perjalanan Biasa	2.568.815.766	2.542.320.732	26.495.034
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(26.495.034)	-	(12.997.787)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	212.550.000	212.550.000	

524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(8.504.600)	-	(8.504.600)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.219.950.853	1.211.446.253	8.504.600
	Total	3.966.316.985	4.001.316.619	34.999.634

Rincian Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas

Kode	Uraian	Total
52	Belanja Perjalanan Dinas	4.001.316.619,00
1211	Beban Perjalanan Dinas	3.966.316.985,00
	Perbedaan	34.999.634,00

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp675.000.000,00 dan Rp750.000.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	675.000.000,00	750.000.000,00	-10
Jumlah	675.000.000,00	750.000.000,00	-10

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.43.741.883.965,00 dan Rp. 755.649.709,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan

dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	301.114.643,00	301.937.971,00	0
Beban Penyusutan Irigasi	8.577.923,00	8.577.923,00	0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0
Beban Penyusutan Jaringan	1.466.411,00	1.466.411,00	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	344.114.643,00	443.667.404,00	-22
Jumlah	656.096.948,00	755.649.709,00	-13

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-54.061.098,00	--79.360.336.,00	-32
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-3.228.284,00	-4.500.000,00	-28
Jumlah	-57.289.382,00	-80.728.336,00	-29

Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu yaitu :

- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.54.061.098,00 berupa pengembalian perjalanan Monev PLK dan Kegiatan Evaluasi dan Laporan kegiatan di TA 2024.
- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.3.228.284,00 berupa pengembalian belanja pegawai berupa uang makan ASN bulan Desember 2024, kekurangan gaji bulan oktober 2024 sd januari 2024 dan kekurangan gaji tunjangan fungsional bulan November 2021 an. Dr. Epsi Euriga dan kekurangan gaji bulan April 2024 sd desember 2024 an. Sumarna, SST.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Pada Tanggal 02 Januari 2024 Polbangtan Yogyakarta melakukan Jurnal Balik yaitu Jurnal penyesuaian Akrual tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut:

No	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	RUPIAH
1	Jurnal Akrual Belanja Barang Langganan Listrik	522111	212112	27.291.293
2	Jurnal Akrual Belanja Barang Langganan Telepon	522112	212112	172.714
3	Jurnal Akrual Belanja Barang Langganan Air	522113	212112	109.000
4	Jurnal Akrual Pengadaan Jasa Internet Utang pada Pihak Ketiga	218111	212191	15.000.000
5	Jurnal Akrual Konsumsi Mahasiswa Utang pada Pihak Ketiga	218111	212191	52.470.000
	Jumlah Total			95.043.007

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- Sampai periode SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED Polbangtan Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta telah melakukan revisi DIPA sebanyak 13 kali dengan rincian berikut:

a. DIPA DAN POK AWAL 1

Nomor dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 24 November 2024

PAGU : Rp. 29.983.129.000

b. DIPA REVISI 2

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 5 Januari 2024

PAGU : Rp. 29.483.129.000

c. DIPA REVISI 3

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 1 Maret 2024

PAGU : Rp. 30.264.989.000

d. DIPA REVISI 4

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 16 Januari 2024

PAGU : Rp. 30.264.989.000

e. DIPA REVISI 5

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 6 Februari 2024

PAGU : Rp. 30.264.989.000

f. DIPA REVISI 6

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 13 Februari 2024

PAGU : Rp. 30.264.989.000

g. DIPA REVISI 7

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 22 April 2024

PAGU : Rp. 30.264.989.000

h. DIPA REVISI 8

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 26 Juni 2024

PAGU : Rp. 30.572.354.000

i. DIPA REVISI 9

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 12 Juli 2024

PAGU : Rp. 30.572.354.000

j. DIPA REVISI 10

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 16 Agustus 2024

PAGU : Rp. 31.212.354.000

k. DIPA REVISI 11

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 9 Oktober 2024

PAGU : Rp. 31.212.354.000

l. DIPA REVISI 12

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 24 Oktober 2024

PAGU : Rp. 31.991.860.000

m. DIPA REVISI 13

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2024

Tanggal : 15 November 2024

PAGU : Rp. 31.991.860.000